



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
UNIT KERJA : SEKRETARIAT JENDRAL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SRIYANA, SH, LLM, DF.M
2. Jabatan : SEKRETARIS JENDERAL
3. NHK : 654224

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.423.201.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 435 m2/250 m2 di KAB / KOTA SUKOHARJO, Rp. 872.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.436.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 46 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 300.765.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	398.700.000
1. MOTOR, HONDA CS 1 Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000		
2. MOBIL, HONDA CRV 1.5 PRESTIGE Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
3. MOTOR, HONDA BEAT SPORTY Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000		
4. MOTOR, VESPA PRIMAVERA Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	14.400.000
D. SURAT BERTHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	9.095.953
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.845.396.953



III. HUTANG

Rp. 218.928.400

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.626.468.553

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.